

# Studi Teoritik Pemikiran Demokrasi Modern

**Hamka Hendra Noer<sup>1</sup>**

Hamkahn\_ukm@yahoo.com

---

## Abstract

The development of democratic theory as a sub-field of political science is concurrent with the existence of modern democracy. Since its establishment, the state theory has dominated the modern democracy. In the study of modern democracy, experts have distinguished between a democratic understanding and democratic theory. The difference aids to explain the approach towards the subject of democracy according to political science experts. Numerous of democracy theories have arisen in the academic environment and constitute the results of the professional political scientists. The discussed literature on contemporary democratic theory reveals there are five theories of democracies that dominate literatures—although many overlapping still. Those five theories withstand are: (a) pluralist, (b) participatory, (c) liberal minimalist, (d) deliberative, and (e) agonistic. Majority of the theoretical debates among political scientists in regards to theory of democracy should involve one or more of the aforementioned theories. Therefore, in order to have a thorough understanding of modern democracy theory, every disciples require to comprehend the discrepancy. Most theoretical debates among political scientists about democratic theory involve one or more of these theories. Therefore, every student who wants to explore modern democratic thought must understand the differences in these five theories.

Keyword: *democracy and politics.*

Perkembangan teori demokrasi sebagai sub-bidang ilmu politik berbarengan dengan keberadaan demokrasi modern. Sejak didirikan, teori negara telah mendominasi demokrasi modern. Dalam studi tentang demokrasi modern, para ahli telah membedakan antara pemahaman demokratis dan teori demokrasi. Perbedaannya membantu menjelaskan pendekatan terhadap subjek demokrasi menurut para pakar ilmu politik. Sejumlah teori demokrasi telah muncul di lingkungan akademik dan merupakan hasil dari para ilmuwan politik profesional. Literatur yang dibahas tentang teori demokrasi kontemporer mengungkapkan ada lima teori demokrasi yang mendominasi literatur — meskipun masih banyak yang tumpang tindih. Kelima teori yang bertahan adalah: (a) pluralis, (b) partisipatif, (c) liberal minimalis, (d) deliberatif, dan (e) agonis. Mayoritas perdebatan teoretis di antara para ilmuwan politik sehubungan dengan teori demokrasi harus melibatkan satu atau lebih teori-teori yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang teori demokrasi modern, setiap murid harus memahami perbedaan tersebut. Sebagian besar perdebatan teoritis di antara para ilmuwan politik tentang teori demokrasi melibatkan satu atau lebih teori-teori ini. Karena itu, setiap siswa yang ingin mengeksplorasi pemikiran demokratis modern harus memahami perbedaan dalam lima teori ini.

Kata Kunci: *Demokrasi dan Politik*

*Copyright © 2019 Jurnal Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. All rights reserved*

---

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Kajian Ketahanan Nasional UI dan Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora

## 1. Pendahuluan

Mengkaji tentang demokrasi, ini adalah ide yang sudah tua. Bahkan karena terlalu tua, demokrasi sudah diperbincangkan sejak zaman Yunani kuno lebih dari 2.500 tahun yang lalu, dan ide demokrasi seiring perkembangan zaman sangat kuat pengaruhnya terhadap pemikiran modern. Teori dan praktek yang termasuk dalam kategori pemikiran demokrasi modern banyak. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk memaparkan secara komprehensif, tetapi hanya rangkuman atas pemikiran demokrasi modern. Dengan asumsi yang mendasari penulis, bahwa peminat ilmu politik akan mencari tahu lebih banyak dari berbagai referensi tentang demokrasi modern. Oleh karena itu, kajian ini akan diletakkan pada konsep demokrasi modern dalam perspektif ilmu politik. Kajian ini akan didahului oleh pendahuluan, kemudian melihat bagaimana korelasi ilmu politik dalam konteks demokrasi modern, melihat pemikiran dan teori demokrasi pada aspek perbedaan fungsional antara hubungan teori dan praktek yang berdampak bagi demokrasi modern, serta melihat implikasi bagi praktek demokrasi modern, dan diakhiri dengan penutup.

## 2. Pembahasan

### 2.1. Korelasi Ilmu Politik Dan Demokrasi Modern

Kajian sistematis terhadap demokrasi dimulai sejak Aristoteles meneliti konstitusi Yunani Kuno hingga adanya paper saat dipresentasikan di asosiasi American Political Science Association (APSA). Sejak asosiasi ini dibentuk tahun 1903, ilmuwan politik Amerika sangat tertarik pada subjek demokrasi.<sup>1</sup> Hal ini

seperti dinyatakan oleh Gunnell (2004:20), menyatakan bahwa:

*APSA has always acknowledge the term of terminology on its mission. Whether to embody the function of democracy in past and modern times. Or to predict the possibility of its function in the future, or to formulate how democracy should function.*

Perkembangan teori demokrasi sebagai sub bidang ilmu politik adalah bersamaan dengan adanya demokrasi modern. Sejak berdirinya, teori negara mendominasi literatur yang sekarang kita namakan pemikiran demokrasi modern. Pada awal 1930-an, teori pluralisme mulai muncul. Teori ini akhirnya digantikan oleh teori liberalisme. Pada 1950-an pluralisme diartikulasikan kembali dalam konteks metodologi internal dan ditandai dengan adanya debat ideologis di dalam APSA (Archard 2004:218; Gray 1995:24; Noer 2003a:30; Young 2002:67).

Debat di kalangan ilmuwan politik Amerika biasanya digambarkan sebagai debat antara mereka yang berusaha mengubah ilmu politik menjadi kajian empirik seperti ilmu alam dan yang memandang ilmu politik lebih

---

membebasakan diri dari tekanan yuridis yang lebih mendasarkan pada pengumpulan data empiris. Bersamaan dengan perkembangan—sosiologi dan psikologi, keduanya sangat mempengaruhi ilmu politik. Perkembangan selanjutnya berjalan sangat cepat, dengan didirikannya American Political Science Association (APSA) pada tahun 1904. Sementara di Indonesia, mulai didirikan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial (di Universitas Indonesia, Jakarta), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta) atau dimana ilmu politik merupakan Departemen tersendiri. Akan tetapi, karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju, tidak mengherankan apabila pada awal perkembangannya, ilmu politik di Indonesia sangat terpengaruh dengan ilmu hukum. Namun, dewasa ini konsep-konsep ilmu politik secara berangsur-angsur mulai di kenal. Mengenai hal ini, lihat Barber (1984), Budiardjo (2008), Gerald (1992), dan Stokes (1999) untuk kajian lebih lanjut.

<sup>1</sup> Di negara-negara benua Eropa sejak abad ke-18 dan ke-19 bahasan mengenai politik banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena saat itu ilmu politik hanya fokus pada konsepsi negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II. Namun, di Amerika Serikat terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan untuk

sebagai kajian normatif subjektif. Meskipun dikotomi agak menyesatkan, perbedaan tersebut sudah mencukupi untuk mendeskripsikan tentang disiplin ilmuwan politik Amerika era 1950-an, 1960-an, dan 1970-an tentang ilmu politik. Sementara teori-teori demokrasi yang dikembangkan mulai 1980-an, merupakan reaksi terhadap hegemoni teori pluralis terutama yang dikembangkan oleh Robert A. Dahl (1956, 1961), memunculkan perdebatan yang dipahami sebagai teori demokrasi yang terlalu empirik—tetapi juga secara paradoks—digunakan untuk tujuan pemahaman normatif. Dari sinilah, para ilmuwan politik Amerika membentuk cara berpikir tentang demokrasi abad ke-21.

## **2.2. Pemikiran Demokratis Dan Teori Demokratis**

Dalam studi tentang demokrasi modern, para ahli membedakan antara; (i) pemikiran demokratis dan (ii) teori demokratis—kedua subjek ini perbedaannya sangat tipis. Tetapi perbedaan ini dapat membantu dalam memahami bagaimana para pakar ilmu politik mendekati subjek demokrasi.

Dalam perspektif pemikiran demokratis dapat didefinisikan sebagai kategori umum yang mencakup pemikiran yang kurang sistematis. Menurut definisi ini, digambarkan seperti; literatur, karya sejarah, jargon politik, dan berbagai contoh pemikiran organisasi tentang partisipasi rakyat dalam pemerintahan dilihat sebagai pemikiran demokratis. Sebagai contoh pemikiran demokratis, merujuk pada karya James Madison seperti dikutip Weiner (2012) adalah upaya untuk mendeskripsikan bagaimana Konstitusi AS pada 1787 akan disusun, dan bagaimana penjelasan konstitusi dapat mengatasi problem perpecahan, serta bagaimana memprediksikan konstitusi dapat menyeimbangkan kepentingan kelompok dengan tanpa merusak negara.

Dari contoh pemikiran demokratis, tentu ini merupakan bagian dari pemikiran politik yang cukup sistematis. Walaupun pemikiran

demokratis sering sistematis, biasanya tidak memenuhi standar ilmu politik modern. Sebagai contoh, apa yang dipahami oleh mahasiswa sejarah politik Amerika Serikat dan umumnya mahasiswa di Indonesia tentang federalis. Konsep federalis, awalnya adalah koleksi artikel yang dipublikasikan di koran New York sebagai upaya politik untuk mengubah opini populer untuk mempertahankan usulan konstitusi. Dalam perspektif ilmu politik modern, konsep federalis akan menuntut analisis objektif yang empiris dan analitis dalam teori ilmiah murni. Karena itu, meski pemikiran politik sering dipandang berkaitan dengan politik riil dalam konteks ideologis—empirik, positif atau analitik—tetap dipandang bebas dari bias ideologi dan lebih menyerupai teori ilmiah murni (Noer 2003b:82).

Sedangkan dalam teori demokratis bisa didefinisikan sebagai upaya yang lebih sistematis untuk mendeskripsikan atau memprediksi—atau keduanya—perilaku fenomena politik. Namun, ketegangan di kalangan ilmuwan politik dalam perdebatan soal tujuan utama disiplin ini, maka teori demokratis lebih tepat dipandang sebagai teori yang berada di antara dua kutub: sisi empirik dan sisi normatif. Hanya sedikit ilmuwan politik yang mengklaim bahwa teori politik dapat sepenuhnya empirik. Sebaliknya, tujuan ilmu adalah membuat teori sebebaskan nilai mungkin. Tetapi, teori demokratis umumnya lebih sistematis ketimbang pemikiran politik demokratis. Maka, pemikiran demokratis sering digunakan sebagai inspirasi untuk teori demokratis. Ini jelas tampak dalam perubahan pemikiran politik Madison menjadi teori pluralis yang dilakukan oleh Dahl (1956).

Banyak teori demokratis terjadi di dalam lingkungan akademik dan merupakan produk dari ilmuwan politik profesional. Pembahasan atas literatur teori demokratis kontemporer mengungkapkan bahwa ada lima teori demokrasi yang mendominasi literatur. Meski ada banyak teori demokrasi—walaupun banyak tumpang-tindih—lima teori utama yang masih bertahan sampai saat ini adalah: (a)

pluralis, (b) partisipatoris, (c) minimalis liberal, (d) deliberatif, dan (e) agonistik—akan dianalisis lebih lanjut di sub bab ini.

Oleh karena itu, setiap mahasiswa yang ingin mendalami pemikiran demokrasi modern harus memahami perbedaan kelima teori ini. Kebanyakan perdebatan teoritis di kalangan teoritisasi politik tentang topik teori demokratis melibatkan satu atau lebih teori ini. Lebih jauh, banyak dari perdebatan di kalangan ilmuwan politik melibatkan teori demokrasi ini melalui beberapa cara.

### a. Teori Pluralis

Dahl (1956) dalam bukunya; *a preface to democratic theory*, merumuskan teori poliarki demokratis. Poliarki adalah pluralisme versi Dahl. Teori pluralis di dalam pemikiran politik Amerika dan ilmu politik bukan temuan Dahl tetapi berakar pada pemikiran politik James Madison<sup>2</sup>. Berdasarkan gagasan Madison, Dahl mendeskripsikan poliarki sebagai:

*In the context of political systems, the regime is governed by several groups, where each group competes to achieve its objectives. Polyarchy is defined as the basic principle of civilians' rights, comprise of the rights to vote (including self-government, majority power and political equality), freedom of expression and organisation. system checks and institutional balance, the competitive electoral systems with at least two political parties, along with the civilians' rights and compatibility to manage the political agenda.*

Dahl kemudian mengilustrasikan bagaimana poliarki berfungsi di dalam konteks Amerika dalam studi klasiknya, *who govern? democracy and power in an american city* (1961). Dalam karya Dahl yang penting adalah upayanya untuk mengembangkan teori demokratis empiris yang konsisten dengan prinsip pendekatan behavioral positivistik yang populer pada masa itu. Dahl menilai bahwa teori demokrasi pada 1950-an tidak memadai karena tidak ada konsensus tentang tujuan teori demokratis.

Kemudian Dahl mengkritik, apakah tujuan teori demokratis untuk mendeskripsikan atau memprediksikan atau membentuk perilaku politik? Dahl dengan jelas menyatakan pikirannya dalam *a preface to democratic theory* (1956) yakni untuk mengevaluasi secara kritis dua aliran teori demokratis dalam sejarah politik Amerika, yaitu; madisonian dan populis, untuk mencatat kelemahan teori-teori tersebut dengan mengembangkan teori demokrasi empiris. Tetapi yang tampak dalam karya Dahl adalah campuran analisis objektif dengan pembelaan normatif untuk poliarki.

Karakteristik definisi poliarki dari Dahl menggambarkan hal ini. Bahwa Dahl mengidentifikasi setiap hak dasar dari poliarki yang otentik bukanlah hal yang aneh. Tetapi rekomendasinya untuk mengontrol agenda politik secara langsung oleh warga menjadi tidak konsisten dengan teori pluralis. Karena teori pluralis dalam sistem politik membolehkan warga negara mengontrol agenda politik secara tidak langsung melalui perwakilan untuk kepentingan konstituennya.

Lebih lanjut, Dahl (1956:68) menyoroti nasib minoritas—rasial, ekonomi, dan lain-lain—yang terabaikan dalam proses politik, dan secara tidak langsung mendukung partisipasi rakyat untuk mendapatkan akses dalam proses tersebut. Dalam hal ini, Dahl menunjukkan dua hal tentang dirinya yaitu menjadi ilmuwan politik yang objektif disatu sisi dan menjadi partisan sistem politik Amerika yang poliarkis disisi lain. Kombinasi ini menghasilkan kontradiktif dalam karyanya pada periode

<sup>2</sup>James Madison lahir di Port Conway, Virginia Amerika Serikat pada tanggal 16 Maret 1751 dan meninggal di Montpelier, Virginia 28 Juni 1836 pada usia 85 tahun. Madison adalah politikus Amerika yang menjadi Presiden Amerika Serikat ke-4 (1809-1817), dan Madison merupakan salah seorang pendiri negara Amerika Serikat. Lihat Labunski (2006:58), Suhindriyo (1999:15) dan Wills (2015:68) sebagai bahan rujukan.

behavioral. Berdasarkan konteks akademik, muncul kritik yang bagus terhadap karakter kontradiktif dalam karya Dahl.

Sepanjang 1960-an dan 1970-an teori poliarki mendapat kritik secara menyeluruh. Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, Charles E. Lindblom memodifikasi teori poliarki Dahl. Lindblom (1977:117) menyatakan bahwa:

*The prime axiom of polyarchy is amiss. By referencing the neo-Marxist ideology, Lindblom argues that the theory of pluralist democracy is viewed as a naïve idea, such considered to be powerful organisations—particularly in large business industries—which have no impact to the political process significantly. In a polyarchy system, a particular position in business plays an important role in the political decision-making process subjected to matters which often have profound consequences towards society.*

Dahl (1972, 1986), kemudian mengakui adanya kelemahan dalam teori poliarki awal. Dilema poliarki adalah teori yang mengakui hak individual dan organisasi yang independen dan otonom. Namun, Dahl juga menyadari bahwa teorinya memungkinkan dimanfaatkan demi kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan publik. Tampak jelas bahwa Dahl berusaha mengatasi kekeliruan utama dalam teori poliarki, dengan asumsi bahwa semua individu dan kelompok adalah sederajat secara politik dan tidak boleh mengorbankan kepentingan publik serta tidak adanya penolakan yang kuat dari kelompok lain.

Semakin jelas bagi Dahl bahwa individu dan kelompok yang paling perlu dikontrol untuk menjaga kesetaraan politik dan demokrasi adalah pejabat negara dan swasta. Dahl (1986) dalam a *preface to economic democracy* berpendapat bahwa kontrol atas pejabat negara di Amerika Serikat seharusnya ada di tangan warga sipil. Hal ini akan

menjamin independensi ekonomi dan politik, yang merupakan prasyarat bagi kesetaraan politik dan sosial untuk menjamin tegaknya demokrasi. Teori demokrasi pluralis—sekali lagi—dimodifikasi untuk menjaga eksistensinya.

Pendukung ‘pluralisme baru’—terutama William E. Connolly (Campbell & Schoolman 2008) dan Chantal Mouffe (Laclau & Motie 1985; Mouffe 2000, 2005)—berpendapat meskipun berbagai aspek dari pluralisme lama masih berharga, kini dibutuhkan konsep baru yang memodifikasi teori ini dengan mempertimbangkan teori post-modernisme, teori post-strukturalisme, teori kritis dan teori feminis (lihat penjelasan pluralisme agonistik Mouffe dalam penjelasan berikutnya).

#### **b. Teori Partisipatoris**

Teori demokrasi partisipatoris berakar dalam demokrasi langsung Yunani Kuno. Demokrasi partisipatoris, berbeda dengan pendukung teori demokrasi pluralis, yang memandang warga dan partisipasi politik dalam memilih anggota kelompok kepentingan dan model konvensional lain. Teori demokrasi partisipatoris, membayangkan partisipasi politik dalam pengertian yang lebih luas. Buku penting Carole Pateman yang diterbitkan tahun 1971 menandai artikulasi komprehensif dari teori demokrasi partisipatoris. Berdasarkan pemikiran politik dari J.J. Rousseau, J.S. Mill, dan G.D.H. Cole<sup>3</sup> Pateman membandingkan

<sup>3</sup> Jean-Jacques Rousseau lahir 28 Juni 1712 dan wafat 2 Juli 1778, adalah seorang filsuf dan komposer Perancis Era Pencerahan dimana ide-ide politiknya dipengaruhi oleh Revolusi Perancis. Melalui tulisan-tulisannya, ia menciptakan otobiografi modern dan mendorong perhatian yang baru terhadap pembangunan subjektivitas—sebuah dasar bagi karya pemikir hebat seperti; Georg Wilhelm, Friedrich Hegel, dan Sigmund Freud. Novelnya ‘*Julie, ou la nouvelle Héloïse*’ adalah salah satu karya fiksi yang banyak terjual pada abad ke-18 dan menjadi acuan penting dalam perkembangan karya-karya romantisme. Ia juga memberikan kontribusi penting pada musik, baik sebagai seorang pengembang teori musik maupun sebagai seorang komposer. Setelah itu, namanya terkenal berkat banyak karyanya antara lain, *Discourse on the Origin of Inequality* (1755); *La*

teori partisipatoris dengan teori pluralis dan menyatakan bahwa kemampuan partisipasi aktif warga untuk mengembangkan kapasitas pemahaman rasionalnya akan kecakapan politik. Selain itu, Pateman berpendapat bahwa masyarakat partisipatoris mengharuskan

cakupan politik diperluas dengan memasukkan bidang di luar pemerintahan.

Pateman (1971) mencontohkan sistem pengelolaan manajemen pekerja di Yugoslavia. Pateman mengisyaratkan potensi manfaat sosial, politik, dan ekonomi dari demokrasi partisipatoris. Pateman menunjukkan contoh dari sistem politik pada sektor masyarakat industri yang demokratis dan terdidik diberdayakan melalui partisipasi demokratis di tempat kerja. Lebih lanjut, Pateman (1971:67) menyatakan:

*Workforce environment is a space where the undemocratic hierarchy structures are clearly visible. On the contrary, the engagement between the employees and equitable of democracy on decision-making, will eliminate the undemocratic cultures. Based on the theory of participatory democracy context, the participants of democracy would produce more benefits than obtained from the conventional model of pluralist democracy.*

Hal ini jelas bahwa keuntungan demokrasi partisipatoris adalah; (i) mempunyai manfaat psikologis, (ii) manfaat politik, (iii) manfaat sosial, dan (iv) manfaat ekonomi.<sup>4</sup>

Teori demokrasi partisipatoris lebih lanjut dijelaskan oleh Macpherson (1977) dengan mengusulkan struktur parlemen atau kongres partisipatoris. Sebagaimana halnya

---

*nouvelle Heloise* (1761); *Emile* (1762); *The Social Contract* (1762); dan *Confessions* (1770) semua karya ini sangat terkenal. Tulisan-tulisan Rousseau merupakan faktor penting bagi pertumbuhan sosialisme, romantisme, totaliterisme, anti-rasionalisme, serta perintis jalan ke arah pecahnya Revolusi Perancis dan merupakan penyumbang buat ide-ide modern menuju demokrasi dan persamaan. Banyak pikiran menarik dan orisinal terdapat dalam tulisan-tulisan politik Rousseau. Tetapi yang paling menonjol dari kesemuanya itu adalah semangat terhadap persamaan hak dan derajat untuk hadirnya keadilan dalam masyarakat. Mengenai hal ini, lihat Cranston (1991) dan Wokler (2001) untuk kajian lebih lanjut.

John Stuart Mill lahir tahun 1806 dan meninggal tahun 1873. Mill seorang ahli falsafah dan pegawai pemerintah berasal dari Inggris. Ia dikenal sebagai reformator yang memperjuangkan unsur utilitarianisme sosial. Ayahnya, James Mill, seorang ahli sejarawan dan akademik. John mempelajari psikologi—yang merupakan inti ilmu falsafahnya—diambil dari ayahnya. Sejak kecil, ia mempelajari Bahasa Yunani dan Bahasa Latin. Pada usia 20 tahun, pergi ke Perancis untuk mempelajari ilmu Bahasa, Kimia, dan Matematik. Menurut Mill, psikologi adalah suatu dasar ilmu pengetahuan yang membentuk ilmu falsafah. Tugas psikologi adalah melihat apa yang terlihat oleh kesadaran dalam sistem pancaindera dan hubungannya dengan manusia. Di dalam etika, Mill melihat hubungan timbal-balik antara manusia secara pribadi dengan masyarakat atas dasar prinsip utilitarianisme. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk kepuasan dirinya sendiri secara psikologi, bukan untuk orang lain. Mengenai hal ini, lihat Harun Hadiwijono (1983) dan Wilson (1999) untuk kajian lebih lanjut.

George Douglas Howard Cole, lahir tahun 1889 dan meninggal 1959 pada umur 69 tahun. Cole adalah seorang pakar teori politik, ekonom, penulis dan sejarawan Inggris. Ia juga sebagai seorang sosialis libertarian yang juga anggota jangka panjang Fabian Society dan seorang advokat untuk gerakan kooperatif. Mengenai hal ini, lihat Wright (1979) dan Carpenter (1974) untuk kajian lebih lanjut.

---

<sup>4</sup>Penjelasan Pateman (1971) bahwa ada 4 (empat) keuntungan demokrasi partisipatoris. Pertama, manfaat psikologis, manusia akan mampu merealisasikan potensinya secara utuh. Kedua, manfaat politik, warga negara akan merasa lebih berdaya dan membuat mereka dapat keluar dari sikap apatis yang mewabah di mata banyak ilmuwan politik pada era 1950-an. Ketiga, manfaat sosial, adanya ruang privat masyarakat, yakni, rumah dan keluarga, yang keberadaannya berada di luar ruang politik. Keempat, manfaat ekonomi, bahaya kesenjangan khususnya kesenjangan ekonomi yang dihadapi akan terlihat dan dapat diatasi melalui kontrol langsung pekerja atas aktivitas produktif. Sebagai bahan kajian lebih lanjut, lihat Dahl (1972) dan Krouse (1982).

Pateman, Macpherson berpendapat bahwa tujuan demokrasi partisipatoris adalah kemampuan anggota masyarakat untuk mengembangkan diri sebagai manusia dan warga sambil bekerja menciptakan masyarakat yang adil. Model Pateman menunjukkan contoh partisipasi di tempat kerja sedangkan Macpherson mencoba mendemokratisasikan institusi politik tradisional yang sudah ada.

Pateman membayangkan demokrasi langsung dan perwakilan digambarkan sebagai sistem piramida. Demokrasi langsung ada di dasar piramida dan demokrasi perwakilan di setiap level di atasnya. Meskipun Macpherson menganggap sistem ini tidak sempurna, dia tetap optimis karena dasar piramida itu adalah demokrasi langsung di lingkungan rumah dan tempat kerja. Jadi, meskipun nanti orang akan naik ke level atas piramida, bentuk partisipasi demokratis tidak langsung dalam sistem ini tetap dikontrol langsung oleh warga negara yang berpartisipasi aktif di bawahnya. Sementara perwakilan yang berada di level atas piramida, akan diberi otoritas untuk bertindak atas nama rakyat, tetapi mereka bisa diganti jika tidak bertindak sesuai dengan kehendak rakyat—termasuk partai politik tunduk pada kontrol warga negara (Noer 2005:18).

Salah satu karya Barber berjudul *Strong Democracy* (1984), adalah karya paling komprehensif di bidang teori demokrasi partisipatoris. Pada tingkatan filosofis, Barber menentang landasan transendental untuk demokrasi partisipatoris. Pada tingkatan praktis, beliau mengembangkan model teori pemerintahan partisipatoris yang komprehensif. Barber membayangkan suatu demokrasi partisipatoris yang mencakup semua sektor dan model masyarakat politik. Visinya sama dengan visi Pateman dan Macpherson. Buku Barber tentang demokrasi partisipatoris dipublikasikan tahun 1980-an, pada saat itu ilmuwan politik sedang kehilangan minat. Makin lama partisipasi dalam demokrasi partisipatoris dipahami dalam pengertian deliberatif yang lebih terbatas. Oleh karena itu, dewasa ini teori demokrasi deliberatif sering dicampur adukkan

dengan teori demokrasi partisipatoris. Padahal, model demokrasi deliberatif melibatkan partisipasi warga, walaupun partisipasinya kurang menyeluruh dan hanya terbatas pada sektor politik dari masyarakat.

Meski ada upaya revitalisasi, teori demokrasi partisipatoris dibayangi oleh teori demokrasi agonistik, deliberatif, dan minimalis. Meskipun demokrasi partisipatoris belum sepenuhnya hilang dari literatur ilmu politik, tetapi semakin sulit untuk menemukan teori demokrasi yang aktif mengembangkannya dengan menggunakan prinsip normatif, karena semakin sulit mencari bukti pendukung keberadaannya. Menurut de Sousa Santos (2005), selama beberapa dekade yang lalu, praktik demokrasi partisipatoris semakin tampak di seluruh dunia. Ini berlaku khususnya di Amerika Selatan. Seperti dijelaskan oleh Leonardo Avrizer (2009), proliferasi institusi partisipatoris di Brasil mengisyaratkan bahwa demokrasi partisipatoris dapat dilakukan. Meskipun disisi lain, minat ilmuwan politik Amerika Serikat tentang demokrasi partisipatoris berkurang. Pertanyaannya adalah, apa hal menarik lain yang dapat dilihat setelah mempelajari kajian internasional tentang demokrasi partisipatoris kontemporer? Mengingat berhasilnya model partisipatoris di Brasil. Ke depan, diprediksi akan banyak kebangkitan minat pada teori demokrasi partisipatoris di Asia Tenggara khususnya Indonesia.

### **c. Teori Minimalis Liberal**

Konsep yang tepat untuk membahas ini dapat dilihat dalam karya Arrow, *Social Choice and Individual Values* (1962). Karya Arrow adalah karya penting tentang teori pilihan sosial. Meski Arrow tidak membahas isu politik secara langsung, tetapi ia mengidentifikasi isu-isu yang mengganggu teori demokrasi.

Paradoks Arrow, membahas problem fundamental yang dihadapi oleh setiap sistem politik yang mengharuskan banyaknya pemilih, dalam menentukan daftar preferensi dari tiga atau lebih alternatif dalam perumusan kebijakan

publik. Dan Arrow dapat menyajikan bukti formal secara logis dengan menciptakan perangkat agregasi yang efektif. Dalam pandangan Arrow, jika dibuat asumsi rasional, bahwa pemilih punya preferensi tepat dalam pemilihan isu akan mendapatkan suara mayoritas sekaligus pemenangnya. Hal ini sejalan dengan teori siklus voting, bahwa pemilihan isu menjadi penting dalam menentukan hasil akhir pemenangnya. Karena itu, apapun perangkat yang dipakai, dan betapapun adilnya sistem preferensi individu, selalu akan memberi hasil irasional karena selalu kalah dengan pemilihan isu. Oleh sebab itu, setiap usaha untuk mengumpulkan preferensi pemilih ke dalam kebijakan sosial rasional niscaya akan selalu gagal.

Contoh lain dari pengaruh pemikiran Arrow pada teori demokrasi adalah karya William H. Riker tentang *Liberalism Against Populism* (1982). Riker adalah pendukung penting teori pilihan rasional dalam ilmu politik dan pengkritik keras demokrasi langsung. Karenanya, analisis beliau tentang demokrasi berasal dari sudut pandang metodologi spesifik tersebut. Riker mengevaluasi implikasi teori pilihan sosial secara umum—juga paradoks Arrow pada khususnya—bagi teori dan praktek demokratis. Menurut Riker, demokrasi mengacu pada cita-cita (partisipasi, kebebasan, dan kesetaraan) dengan metode untuk mengumpulkan preferensi individu ke dalam pemerintahan sosial kolektif (voting).

Diasumsikan oleh Riker, bahwa cita-cita partisipasi demokratis, kebebasan, dan kesetaraan dapat dicapai melalui keinginan bersama melalui voting. Pertanyaannya adalah, apakah ini bisa dilakukan dalam prakteknya? Riker menegaskan bahwa pertanyaan penting ini tidak dapat dijawab dengan memuaskan, tetapi pertanyaan ini dapat dijawab dengan menerapkan teori pilihan sosial analisis dalam demokrasi.

Riker (1982) mengawali analisisnya dengan asumsi prinsip individualisme metodologis teori pilihan rasional. Menurut Riker, warga negara yang memberikan

preferensinya pada kotak suara merupakan syarat penting dalam demokrasi. Lanjut Riker, demokrasi memerlukan voting, kecuali voting mayoritas sederhana antara dua alternatif—yang jarang terjadi—dan menjadi problem—voting strategis (paradoks Arrow) dan penentuan agenda. Voting strategis terjadi ketika pemilih berusaha menggunakan hak suaranya untuk mengubah hasil pemilu menjadi berbeda dari hasil penghitungan akhir apabila semua memilih secara jujur.

Riker menyatakan bahwa jenis voting strategis adalah bersifat umum dan merupakan problem yang tak bisa dihilangkan. Sementara penentuan agenda menjadi masalah yang juga sulit. Kekuatan untuk menentukan agenda sering dipegang oleh elite partai dan terkadang oleh warga biasa. Salah satu contoh, penentuan agenda pemilihan kandidat (calon) atau isu yang ditawarkan kepada pemilih. Seringkali pemilih tidak punya banyak kesempatan dalam proses seleksi awal bagi calon dalam pemilu,—seperti dicatat oleh Arrow dan Riker—,tetapi dipaksakan proses tetap berjalan walaupun ini sangat tidak demokratis. Karena voting strategis dan penentuan agenda tidak bisa dibatalkan, maka dilakukan kecurangan pada hasil yang sesungguhnya (Riker 1982:238). Oleh itu, voting diberberapa negara yang menggunakan sistem politik demokratis pada dasarnya tidak fair dan melanggar prinsip kebebasan dan kesetaraan.

Jika diasumsikan bahwa pemilihan adalah kegiatan utama demokrasi (Riker 1982:5), maka dapat dibedakan antara pemahaman liberal dan populis terhadap pemilihan. Pemilihan adalah alat protektif yang digunakan warga negara untuk melindungi hak mereka dari berbagai macam bentuk kekuasaan tirani atau anti demokrasi. Oleh itu, demokrasi adalah metode yang digunakan rakyat untuk mengontrol pemimpinnya mencegah dari tirani dan menjaga kebebasan dan kesetaraan politik.

Lebih jauh, pandangan liberal terhadap pemilu adalah sama dengan pendekatan pilihan rasional, karena caranya dianggap rasional dan normatif, tetapi tidak ada penilaian terhadap

tujuannya. Ciri-ciri utama dari teori demokrasi liberal pemahamannya menjadi luas ketika disandingkan dengan teori populis. Teori populis berpendapat bahwa partisipasi dalam politik adalah merumuskan dan mengesahkan legislasi. Populis—dalam pandangan Riker mayoritas tidak akan menjadi tirani—bahwa partisipasi tidak menjalankan fungsi negatif, tetapi partisipasi diperlukan untuk kebebasan. Manakala dalam pandangan liberal, partisipasi bukan hanya cara untuk melindungi kebebasan, tetapi partisipasi juga melahirkan kebebasan.

Solusi Riker (1982) untuk problem demokrasi dan paradoks Arrow adalah dengan menolak populisme dan menganut liberalisme. Pertanyaannya, mengapa populisme harus ditolak? Seperti dalam teori pilihan sosial Riker, menunjukkan mustahil bagi rakyat untuk bersatu dalam kebijakan melalui pemilu. Sebaliknya, Riker mengganti praktek pemilihan mayoritas dan gagasan populer. Menurut Riker, tidak mungkin tirani mayoritas akan melakukan tirani atas minoritas. Hal ini menjelaskan mengapa Riker tidak memberikan contoh tirani mayoritas. Lebih lanjut, Riker menyatakan demokrasi populis bisa diwujudkan hanya dalam pemilu dengan dimensi isunya dibatasi (Riker 1982:241) yang memungkinkan rakyat untuk memilih antara isu dan agenda politik. Namun, seperti ditegaskan Riker manipulasi agenda politik yang mereduksi proses pemilu selalu menjadi persoalan penting dalam melemahkan proses populis. Dalam artian, ada orang lain—elite politik—yang akan mengintervensi dan memilih isu atau kandidat dari sekian banyak pilihan yang ada.

Pendekatan pilihan rasional Riker (1982) mendorongnya pada kesimpulan bahwa populisme itu tidak berbahaya, namun tidak dapat diperankan. Tetapi Riker tidak menyerah. Pertanyaannya adalah dapatkah liberalisme menghindari paradoks Arrow? Jawabannya mungkin ya apabila demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi populis, tetapi jawaban tidak jika demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi liberal. Riker kemudian memecahkan problem demokrasi dari pilihan

sosial dengan mendefinisikan demokrasi apakah liberal atau populis, dan kemudian menunjukkan bagaimana teori pilihan sosial menunjukkan hanya liberalisme yang dapat dipertahankan. Riker menolak visi demokrasi populis yang dianggapnya kosong, tidak konsisten, dan absurd, serta menyatakan versi liberal sebagai bentuk demokrasi yang dapat dipraktekkan. Demokrasi liberal dapat dijalankan karena berbeda dengan populisme, liberalisme mensyaratkan pemilih hanya memilih dua kandidat yang saling bersaing.

Bantahan atas teori demokrasi liberal Riker datang dari Mackie (2003) dengan menulis pembelaan yang komprehensif atas demokrasi dari kritik teori pilihan sosial Riker. Mackie (2003:167) menyatakan bahwa Riker keliru mengasumsikan berbagai problem demokrasi modern yang tidak dapat diatasi. Teori pilihan sosial seperti yang dikemukakan Riker secara tidak objektif lebih menekankan kemungkinan logis dari siklus pemilu, pemilihan strategis, kontrol agenda, dan problem lain yang diasosiasikan dengan preferensi agregat, daripada probabilitas empirisnya.

Dengan kata lain, Riker mendasarkan pembelaan liberalismenya terhadap populisme pada kemungkinan siklus pemilu, pemilihan strategis, dan kontrol agenda akan terjadi dalam kenyataan. Riker mengutip sejumlah contoh yang diambil dari sejarah politik Amerika dalam upaya untuk menunjukkan bahwa hal ini benar-benar pernah terjadi.

Sementara, Mackie membela demokrasi populis dengan mengkaji contoh historis yang dikutip Riker untuk mendukung kritik pilihan rasionalnya. Mackie berpendapat bahwa bukti yang ditunjukkan Riker, jika diteliti dengan cermat, tidak mendukung kesimpulan bahwa demokrasi populis adalah mustahil. Mackie menunjukkan bahwa pada masalah utama dalam argumen Riker terdapat kesalahan logika dan fakta yang menyebabkan kritik pilihan sosial adalah benar.

#### **d. Teori Deliberatif**

Teori demokrasi deliberatif muncul tahun 1980-an dan matang tahun 1990-an. Demokrasi deliberatif dipandang oleh banyak teori politik sebagai pengganti teori partisipasi utopian dan sebagai respons terhadap munculnya teori demokrasi minimalis liberal. Habermas (1987, 1989, 1990, 1996) dianggap sebagai bapak filsafat demokrasi liberatif dan diakui sebagai pemikir yang paling bertanggung jawab atas kebangkitan kembali perhatian pada deliberasi (pertimbangan).

Secara spesifik, Habermas berusaha mengembangkan teori tindakan komunikatif, yang bertujuan mendukung kemampuan rakyat mencapai konsensus realitas dan norma untuk memandu tindakan mereka. Idealnya, tindakan komunikatif akan menghasilkan pemahaman bersama dikalangan warga tentang cara pandang dunia. Manfaat dari proses ini jelas bagi setiap orang yang mempelajari teori demokrasi.

Dalam perspektif umum, Habermas (1990:130) mengemukakan metode pragmatis-transendental. Habermas berpendapat bahwa pendekatan ini akan membebaskan tindakan komunikatif dari ketergantungan pada kultur spesifik atau institusi moral yang berakar pada kultur. Pendekatan pragmatis-transendental digunakan untuk membenaran atas teori wacana etika, dimana dalam teori situasi perbincangan ideal (Habermas 1990:130) rakyat dianggap mampu berpikir berdasarkan aturan yang ada, dan penilaian politik dibuat berdasarkan proses pertimbangan yang diterima oleh rakyat.

Terlihat jelas bahwa isu utama dari teori deliberatif berhubungan dengan isu teori minimalis liberal. Isu utama teori minimalis liberal berhubungan dengan konsensus atas kebenaran bersama dan sumber legitimasi prosedur politik dan sistem politik secara keseluruhan. Substansi teori minimalis liberal terdapat konsep rakyat sebagai konsumen pasif yang mengontrol pemimpin melalui pemilu, dan proses politik dipandang sebagai medium persaingan kekuasaan antar berbagai kepentingan, bukan tempat mencari kebaikan bersama. Oleh karena itu, model deliberatif

dirancang untuk mendorong warga negara berpartisipasi aktif dalam proses politik dengan mencari konsensus tentang kebaikan umum di dalam forum publik.

Asumsi lain dari teori minimalis liberal adalah warga memilih sesuai dengan keinginannya. Jadi, tujuan utama dari sistem politik adalah mengumpulkan preferensi melalui prosedur pemilihan tertentu. Dalam pemilihan, pertanyaan tentang bagaimana terbentuknya asal usul preferensi pemilih, dan apakah preferensi itu tetap atau bisa berubah karena sering diabaikan oleh penganut teori minimalis. Untuk mengatasi kekurangan ini, maka disusun teori tentang proses pembentukan preferensi. Sementara, teori deliberatif mengasumsikan bahwa kebaikan umum dapat diidentifikasi melalui pemikiran warga. Konsekuensinya, ketika warga menyampaikan preferensinya melalui pemilu legislasi hasilnya dianggap mewakili individu, bukan pengakuan untuk kebaikan bersama. Dan rakyat dipaksa bersedia menerima hasilnya.

Teori tindakan komunikatif Habermas (1987:167-168) adalah penting bagi teori demokrasi deliberatif, tapi juga merupakan teori yang problematis. Asumsi penting adalah tuntutan bahwa pengakuan beragam adanya pandangan berbeda-beda dapat menghasilkan konsensus tentang norma sosial dan politik fundamental. Pengakuan semacam itu membutuhkan identifikasi dan justifikasi atas berbagai macam prinsip moral universal yang akan disepakati secara sukarela oleh partisipan.

Prinsip ini mencakup asumsi bahwa semua warga adalah bebas, sederajat, mau dan bisa secara aktif mencari kesepakatan tentang norma politik dan sosial. Habermas mengambil prinsip ini dari asumsinya tentang bahasa komunikasi manusia. Jadi, beliau berpendapat bahwa manusia secara implisit menyepakati norma ketika saling berusaha memahami satu sama lain. Di sinilah teori Habermas mengalami kesulitan yang terus membayangi teori demokrasi deliberatif. Pertanyaannya adalah, atas dasar apa Habermas bisa mengasumsikan bahwa semua warga negara

akan sepakat pada norma sosial dan politik yang penting itu?

Kelemahan teori demokrasi deliberatif Habermas lainnya, tidak memperhatikan pada penerapan institusi. Habermas mengakuinya, dan karena itu dalam *Between Facts and Norms* (1996) beliau berusaha menunjukkan bahwa teori tindakan komunikatif dan teori diskursus etika adalah seirama dalam akal dan bahasa manusia, sehingga menjadikan institusi demokrasi deliberatif menjadi dasar pragmatist-transendental. Tetapi Habermas gagal meyakinkan untuk institusionalisasi demokrasi deliberatif atau untuk mengidentifikasi dinamika sosiologis yang membuat demokrasi deliberatif memiliki landasan sejarah. Namun sebenarnya, dalam karya Habermas, perwujudan institusional dari teori demokrasi terkadang disebutkan secara jelas. Meski demikian, demokrasi Habermas hanya menawarkan visi yang lemah tentang pemerintahan demokrasi deliberatif. Lebih jauh, karyanya lebih banyak menyebabkan pergeseran debat teori demokrasi dan menjauhi praktek demokrasi. Ini adalah ironis, mengingat teorinya membahas praktek demokrasi.

Salah satu tujuan Habermas adalah menawarkan justifikasi filsafat demokrasi yang tak terbantahkan. Habermas berpendapat bahwa demokrasi terkorelasi dalam struktur bahasa rasional dan karenanya lebih menekankan pada identifikasi landasan filsafat ketimbang identifikasi dinamika sosiokultural sejarah yang memberdayakan demokrasi deliberatif. Habermas berusaha untuk menempatkan prinsip-prinsip demokrasi di luar debat publik. Ini menjadi problematis.

Model Teori Habermas adalah demokrasi dimana intinya debat tentang norma sosial. Meskipun demikian, tampak bahwa norma rasionalitas dan ekspresi bahasa melalui pemikiran demokratis berada di luar perdebatan. Habermas menegaskan, bahasa itu sendiri menunjukkan, secara a priori, bahwa prinsip demokrasi itu sudah (*given*) secara transendental. Oleh sebab itu, Habermas tidak mau menempatkan beberapa tuntutan

kebenaran ke debat—misalnya, klaim neo-Nazi—sebab hal itu melanggar prinsip demokrasi. Jika Habermas adalah pragmatis demokratis dalam tradisi John Dewey atau Richard Rorty, dia tidak dapat meyakini pengecualian semacam itu. Tetapi karena dia menganut tradisinya, maka dia terpaksa harus menjustifikasi pengecualian ini, dan justifikasinya masih tetap bisa dipertanyakan.

#### e. Teori Pluralis Agonistik

Mouffe adalah teoritis demokratis radikal dan pengkritik sengit model demokrasi deliberatif dan minimalis (Laclau & Mouffe 1985; Mouffe, 2000, 2005). Mereka termotivasi oleh keyakinan bahwa versi lama teori pluralisme dan partisipasi, teori minimalis liberal, dan teori demokrasi deliberatif adalah tidak memadai untuk menggantikan teori demokrasi radikal yang diasosiasikan dengan proyek Marxis dan demokrasi sosial lainnya. Mouffe menyebut teori alternatifnya ini sebagai pluralisme agonistik. Gaya teori Mouffe adalah mengikuti tradisi Marxis, sosialis dan teori kritis neo-Marxis, tetapi teorinya sangat signifikan dipengaruhi oleh pemikir post-modern dan post-strukturalis seperti; Foucault, Derrida, dan Wittgenstein. Meski pluralisme agonistik belum berkembang atau berpengaruh seperti teori minimalis atau deliberatif, namun teori ini semakin berpengaruh sepanjang dekade pertama abad ke-21.

Teori demokrasi agonistik memandang bahwa politik digerakkan oleh konflik, bukan konsensus. Penekanannya adalah untuk mendorong dan menjaga keberagaman sosial, bukan menghilangkan berbagai macam identitas dengan menggunakan kehendak umum. Teori ini bukan reformis tetapi berusaha untuk melakukan transformasi demokratis radikal atas masyarakat melalui pembentukan 'kontra-hegemoni'. Karenanya, model ini didasarkan pada model masyarakat postmodern, yang memandang politik sebagai ruang pertemuan antar banyak identitas, gaya hidup, dan wacana kultural. Semua ini menghadirkan tantangan bagi diskursus hegemonik dari neo-

liberalisme, yang oleh Mouffe diartikan sebagai ideologi politik yang menegaskan kedaulatan pasar dan hak istimewa di semua bidang masyarakat. Tantangan seperti itu harus didukung, karena satu-satunya proses untuk melawan dan melemahkan wacana hegemonik. Tetapi, tujuannya bukan mengganti wacana hegemonik dengan wacana lain, melainkan menciptakan politik pluralisme dan indeterminasi radikal.

Dalam ruang publik pluralis radikal yang dibayangkan oleh demokrat agonistik, kekuatan-kekuatan sosial, kultural, dan politik yang berbeda-beda akan bertemu di seputar nilai-nilai kultural, demokrasi langsung, dan resistensi terhadap wacana hegemonik. Resistensi ini bersifat terus-menerus dan menggambarkan karakter agonistik dalam sifat manusia dan politik. Karakteristik ini tidak seharusnya dihindari tetapi diakui sebagai kondisi yang diperlukan untuk demokrasi radikal.

Mouffe mengemukakan perbedaan konseptual penting antara *'the political'* dan *'politics'* yang membantu menjelaskan kritiknya terhadap demokrasi liberal kontemporer dan manfaat teori demokrasi agonistik. *Politics* mengacu pada sistem politik dan berbagai macam proses yang berkaitan dengan bidang politik. Sedangkan *the political* adalah ciri definisi manusia dan masyarakatnya. Konsep ini mencakup dan mengekspresikan keyakinan Mouffe bahwa antagonisme adalah ciri utama dari masyarakat dan itu merupakan ciri dari setiap praktek institusi yang bersifat politik.

Mouffe berkali-kali mengakui dan menggunakan istilah *political* sebagai istilah yang bisa diperdebatkan. Dia berpendapat bahwa kebanyakan pemikir politik di dalam tradisi pencerahan modernis berupaya untuk mengeliminasi antagonisme dengan menggunakan prinsip rasional yang menghasilkan konsensus. Lanjut Mouffe, upaya ini salah dan jelas berbahaya bagi politik demokratis karena konflik adalah produk dari pluralisme identitas, yang tetap merupakan

aspek penting manusia. Jadi, setiap usaha untuk menghilangkan konflik dari proses demokrasi akan membahayakan pluralisme. Kritik Mouffe terhadap demokrasi liberal—sebagai paradoks demokratis—dapat digambarkan dengan melihat pada kritiknya terhadap kontribusi Rawls dan Habermas terhadap demokrasi deliberatif. Mouffe berkonsentrasi pada dua isu yang menunjukkan kelemahan teori deliberatif.<sup>5</sup>

Pluralis agonistik berpendapat bahwa 'tarik-menarik' ini tidak bisa dihilangkan dan itu bukan masalah. Tindakan Habermas dan Rawls untuk memisahkan politik dari efek pluralisme niscaya gagal. Tujuan demokrasi agonistik adalah negosiasi paradox (Mouffe 2000:93). Karenanya, tujuan teori demokrasi agonistik adalah mengakui adanya realitas dan menyusun teori institusi yang tidak akan berusaha menghilangkan 'ketegangan', tetapi 'menjinakannya' sehingga bisa menjaga elemen konflik yang baik bagi politik demokrasi sambil mengontrol elemen yang destruktif. Setelah *'the political'* diakui dan politik demokrasi dibuat teorinya, langkah selanjutnya adalah mulai memikirkan bagaimana hal-hal yang bersifat politik akan muncul dalam bidang politik, yakni institusi apa yang bisa menjinakkan elemen agonistik.

---

<sup>5</sup>Sorotan terhadap kelemahan teori deliberatif yang digambarkan oleh Mouffe. Pertama, Habermas dan Rawls berusaha untuk menghilangkan pluralisme nilai—sumber berharga dari agonisme—dari ruang publik. Ini adalah prasyarat dalam mencapai tujuan legitimasi demokratis melalui konsensus menurut Rawls dan Habermas. Namun, menurut Mouffe, Habermas dan Rawls membatasi pluralisme di ruang non publik untuk menyaring politik dari konsekuensinya. Konsekuensi ini adalah penghilangan konflik dan agonisme, yang menurut Mouffe merupakan kualitas penentu dari *the political*. Kedua, Habermas dan Rawls berusaha merekonsiliasikan kebebasan lama dengan kebebasan baru. Dari perspektif agonistik Mouffe, usaha untuk merekonsiliasikan dua kebebasan ini sama artinya menyangkal karakter paradoks dari demokrasi modern dan ini akan menimbulkan 'tarik-menarik' antara logika demokrasi dengan logika liberalisme. Untuk lebih jelas mengenai masalah ini, lihat Habermas (1996), Mouffe (2000), Rawls (2005).

Bukan berarti teori pluralisme agonistik dari Mouffe berjalan dengan baik. Para pengkritik menunjukkan setidaknya ada tiga problem signifikan dalam pluralisme agonistik Mouffe. Pertama, kritik menyatakan bahwa legitimasi pemerintahan pluralis agonistik membutuhkan konsensus kolektif pada prinsip dasarnya. Kritik ini menunjukkan bahwa pluralisme agonistik memiliki cacat dasar yang sama seperti yang di lihat Mouffe dalam teori demokrasi deliberatif. Kedua, pada argumen Mouffe bahwa demokrasi parlementer adalah perwujudan institusi politik ideal untuk pemerintahan pluralis agonistik. Jadi, dukungan Mouffe pada demokrasi parlementer mendukung status quo. Ketiga, kritik paling keras terhadap pluralisme agonistik Mouffe diberikan oleh Norval (2007). Meskipun terbuka pada post-modernisme dan post-strukturalisme yang membentuk teori demokrasi Mouffe, Norval (2007:17) menyatakan bahwa teori Mouffe sangat abstrak dan tidak berkaitan dengan praktek dan kosa kata politik nyata. Solusinya adalah modifikasi pluralisme agonistik yang oleh Norval disebut demokrasi aversif. Meski ada kritik, pluralisme agonistik kemungkinan akan menjadi teori demokrasi utama dan berpengaruh dalam pemikiran demokrasi modern.

### **2.3. Implikasi Bagi Praktek Demokrasi Modern**

Meski ada ketegangan antara teori demokrasi dengan praktek demokratis, ada beberapa contoh praksis. Seperti pepatah antara telur dan ayam, untuk mengetahui apakah suatu teori demokrasi mempengaruhi praktek demokrasi atau sebaliknya. Dimungkinkan bahwa teori demokrasi menggunakan dasar praktek demokrasi untuk menyusun dan memperbaiki teori, setidaknya berfungsi sebagai cetak biru bagi bentuk praktek demokrasi yang baru. Dengan beberapa contoh, penjelasan bagaimana teori demokrasi kontemporer masih mempengaruhi praktek demokrasi modern.

Salah satu contoh adalah studi transisi demokratis. Para sarjana tertarik untuk memahami problem dalam transisi politik dari rezim otoriter ke demokrasi konstitusional. Setelah ambuknya Uni Soviet pada 1989, dan runtuhnya rezim otoriter di Irak, ilmuwan politik yang mengkaji transisi demokratis sering menggunakan pemikiran demokrasi modern dalam upaya mengetahui apa konstitusi yang sebaiknya dibuat untuk suatu negara. Dan, kebanyakan penyusun konstitusi menganggap model minimalis liberal adalah yang paling cocok. Meskipun, menurut ilmuwan politik, dalam beberapa kasus pemikiran demokrasi modern menawarkan beberapa alternatif yang bisa dipilih. Pada akhirnya para ilmuwan sering tidak punya, atau hanya sedikit memiliki, kontrol langsung atas teori demokrasi yang menjadi pedoman penyusunan konstitusi. Meskipun demikian, pemikiran demokrasi modern mampu menjelaskan dan mengkritik rezim yang teridentifikasi sebagai rezim demokratis.

Contoh lain menggunakan salah satu konsep yang banyak diperdebatkan oleh teoritis demokrasi yaitu partisipasi. Partisipasi demokrasi dapat beragam bentuknya seperti; legislasi, protes, keanggotaan kelompok kepentingan, surat, dan sebagainya. Apa yang oleh teori demokrasi dipandang sebagai contoh tindakan partisipasi demokratis, oleh teoritis lain boleh jadi ditolak atau bahkan dianggap berbahaya. Berbagai macam teori demokrasi yang diulas dalam kajian ini menunjukkan bahwa partisipasi masih merupakan konsep penting dalam pemikiran demokrasi modern. Banyak yang membayangkan demokrasi dengan tingkat partisipasi tinggi di masyarakat mendasarkan idenya pada teori demokrasi partisipatoris untuk menentang rezim yang kurang demokratis atau anti-demokratis.

Pertanyaan kemudian, apakah pemilihan model partisipasi yang memadai dalam suatu demokrasi, seperti pandangan teori minimalis? Atau, seperti dikatakan demokrat deliberatif, atau pertimbangan dan pemikiran, ruang diskusi, ataukah debat itu diperlukan untuk

demokrasi? Sekali lagi, mungkin demokrat partisipatori benar ketika mereka mendukung teori partisipasi ekspansif yang memasukkan elemen tempat kerja dan rumah tangga. Konsep partisipasi sebagaimana dielaborasi di banyak teori demokrasi masih mengilhami warga negara untuk menjustifikasi dan mengkritik demokrasi tersebut—seperti mendorong mereka untuk bertindak.

Contoh selanjutnya pengaruh teori demokrasi terhadap praktek demokratis adalah teknik jejak pendapat (polling) deliberatif seperti yang dikembangkan oleh Fishkin (1991). Polling deliberatif, seperti diisyaratkan dari namanya, berasal dari teori demokrasi deliberatif yang dirumuskan oleh Habermas. Pada awal 1990-an, Fishkin mengusulkan agar warga negara secara acak dipilih dari populasi dan berkumpul untuk mendengarkan pakar berbicara tentang isu-isu yang akan di voting. Partisipan kemudian mendiskusikan dan berdebat sebelum memberikan suara. Bukti dukungan demokrat deliberatif bahwa prosedur deliberatif dapat membantu warga negara merumuskan preferensinya dengan tujuan kebaikan bersama.

Lebih jauh, karena sampel warga negara ini representatif, kita dapat menggeneralisasikan dari hal khusus ke umum dan menyimpulkan bahwa cara sampel memilih akan sama dengan cara semua warga memilih—jika mereka punya kesempatan deliberatif yang sama. Baru-baru ini, Fishkin & Ackerman (2005) mengusulkan ide ‘hari deliberasi’. Kedua penulis itu merekomendasikan agar warga diberi waktu setidaknya satu hari dalam satu tahun mereka bisa mempertimbangkan gagasan demokrasi secara mendalam, dimana hari libur dipakai untuk deliberasi demokratis. Meskipun usulan ini bersifat eksperimental, usulan itu cukup menjanjikan bagi demokrasi modern ke depan.

### 3. Penutup

Demokrasi masih menarik perhatian para ilmuwan politik. Konsekuensinya, keadaan

teori demokrasi kontemporer masih sangat hidup dan dinamis. Kini jelas bahwa bagi mahasiswa yang ingin menjadi ilmuwan politik harus tetap disiplin dalam mengkaji demokrasi. Mahasiswa yang baik harus berusaha keras menguasai pemikiran demokrasi modern. Mahasiswa harus memahami banyak teori demokrasi yang telah dirumuskan oleh teoritis dan ilmuwan politik selama 50 tahun terakhir dan memahami konteks di mana pemikiran itu berkembang dan cara-cara dimana teori itu berkonflik dan tumpang-tindih.

Lima teori yang menonjol, yakni teori pluralis, partisipatoris, minimalis liberal, deliberatif dan agonistik, semuanya memberi kontribusi untuk memahami pemikiran demokratis modern. Konsepsi demokrasi ada di jantung ilmu politik terutama di Amerika, salah satu atau lebih dari teori ini kemungkinan akan masuk ke dalam riset ilmuwan politik. Bagi mahasiswa ke depan akan memilih fokus pada perbandingan politik, hubungan internasional, pemikiran politik, administrasi publik, teori politik, atau teori lain yang relatif baru akan terus berkembang dan topik demokrasi akan selalu aktual. Pada abad ke-21, diharapkan karakteristik utama dari ilmuwan politik yang kompeten adalah pemahamannya yang komprehensif atas pemikiran demokrasi modern.

### Daftar Pustaka

- Archard, D. 2004. From Pluralist to Patriotic Politics, Putting Practice First. *Contemporary Political Theory* Volume 3(2): 212-227.
- Arrow, K. 1962. *Social Choice and Individual Values*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Avritzer, L. 2009. *Participatory Institutions in Democratic Brazil*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Barber, B. (1984). *Strong Democracy: Participatory Politics for Anew Age*. Berkeley: University of California Press.

- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Ed. Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Campbell, D., & Schoolman, M. 2008. *The New Pluralism: William Connolly and The Contemporary Global Condition*. Durham, NC: Duke University Press.
- Carpenter, L.P. 1974. *G.D.H. Cole: An Intellectual Biography*. London: Cambridge University Press.
- Cranston, M. 1991. *Jean-Jacques: The Early Life and Work of Jean-Jacques Rousseau*. Chicago: University of Chicago.
- Dahl, R. A. 1956. *A Preface to Democratic Theory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Dahl, R. A. 1961. *Who Governs? Democracy and Power in An American City*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Dahl, R. A. 1972. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Dahl, R. A. 1986. *A Preface to Economic Democracy*. Berkeley: University of California Press.
- De Sousa Santos, B. (Ed). 2005. *Democratizing Democracy: Beyond The Liberal Democratic Canon*. London: Verso.
- Fishkin, J. S. 1991. *Democracy and Deliberation*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Fishkin, J. S., & Ackerman, B. 2005. *Deliberation Day*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Gerald. 1992. Concepts of Political Parties. *Journal of Theoretical Politics* 4(3):143-59.
- Gray, J. 1995. *Liberalism*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Gunnell, J. G. 2004. *Imagining The American Polity: Political Science and The Discourse of Democracy*. University Park, PA: Pennsylvania University Press.
- Habermas, J. 1987. *The Theory of Communicative Action (Vol. 1&2)*. Boston: Beacon.
- Habermas, J. 1989. *The Structural Transformation of The Public Sphere: An Inquiry Into A Category of Bourgeois Society*. Cambridge: MIT Press.
- Habermas, J. 1990. *Moral Consciousness and Communicative Action*. Cambridge: MIT Press.
- Habermas, J. 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to A Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Hadiwijono, H. 1983. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Krouse, R.W. 1982. Polyarchy And Participation: The Changing Democratic Theory of Robert Dahl. *Polity* 14:441-463.
- Labunski, R. 2006. *James Madison And The Struggle For The Bill of Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Laclau, E., & Mouffe, C. 1985. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards A Radical Democratic Politics*. London: Verso.
- Lindblom, C. E. 1977. *Politics and Markets*. New York: Basic Books.
- Mackie, G. 2003. *Democracy Defended*. Cambridge UK: Cambridge University Press.
- Macpherson, C. B. 1977. *The Life and Times of Liberal Democracy*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Mouffe, C. 2000. *The Democratic Paradox*. London: Verso.
- Mouffe, C. 2005. *On The Political*. London: Routledge.
- Noer, H. Hendra. 2003a. Negara Dan Civil Society: Perspektif Demokratisasi. *Resonansi* 1(1): 26-37 (ISSN 1693-0347, Jakarta).
- Noer, H. Hendra. 2003b. Membedah Postulat Negara, Sebuah Kajian Teoritis. *Resonansi* 1(2): 78-89 (ISSN 1693-0347, Jakarta).
- Noer, H. Hendra. 2005. Menggagas Masa Depan Gorontalo. Dlm. *Funco Tanipu, Hendrik Imran, Suwardi Dianelo & Zulkarnaen Iskak (pnyt).* Partisipasi

- Politik Rakyat Menuju Pemberdayaan Civil Society, hlm. 3-28. Yogyakarta: HPMIG Press.
- Norval, A. 2007. *Aversive Democracy: Inheritance and Originality in The Democratic Tradition*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Pateman, C. 1971. *Participation and Democratic Theory*. UK: Cambridge University Press.
- Rawls, J. 2005. *Political Liberalism*. Ed. Ke-2. New York: Columbia University Press.
- Riker, W.H. 1982. *Liberalism Against Populism: A Confrontation Between The Theory Of Democracy And The Theory Of Social Choice*. San Francisco: Freeman.
- Stokes, S. 1999. *Political Parties and Democracy*. *Annual Review of Political Science* 2:243-67.
- Suhindriyo. 1999. *Biografi Singkat Presiden-Presiden Amerika Serikat*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Weiner, G. 2012. *Madison's Metronome: The Constitution, Majority Rule, And The Tempo Of American Politics*. Kansas: University Press of Kansas.
- Wills, G. 2015. *James Madison: The American Presidents Series: The 4th President, 1809–1817*. New York: Times Books.
- Wilson, F. 1999. John Stuart Mill. Dlm. Robert Audi (pnyt.). *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Hlm. 568-571. London: Cambridge University Press.
- Wokler, R. 2001. *Rousseau: A Very Short Introduction*. Oxford: University of Oxford.
- Wright, A.W. 1979. *G.D.H. Cole And Socialist Democracy* New York. Oxford: University of Oxford.
- Young, S. 2002. *Beyond Rawls: An Analysis of The Concept of Political Liberalism*. Lanham: University Press of America.